Jurnal Penelitian Hukum De Jure

Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Volume 24 Nomor 3, November 2024 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure



Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum dengan frekuensi terbitan tiga kali dalam setahun, yaitu di bulan Maret, Juli, dan November yang diterbitkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, bekerja sama dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI) (Legalisasi Badan Hukum Perkumpulan: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, tanggal 28 Januari 2013). Jurnal ini bertujuan untuk menjadi wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan berbagai permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia pada khususnya dan masyarakat hukum pada umumnya. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 177/E/KPT/2024 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024 tanggal 15 Oktober 2024, menetapkan bahwa Jurnal Penelitian Hukum De Jure mendapat peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2). Dalam pengelolaannya, Jurnal Penelitian Hukum De Jure melibatkan berbagai pihak yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPH-18.LT.04.03 TAHUN 2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Tahun Anggaran 2024, dengan tim sebagai berikut:

Pembina:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengarah:

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan

Pemimpin Umum/Redaksi:

Ahyar, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Anggota Dewan Redaksi:

Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H. (Universitas Muslim Indonesia Makassar)
Ahsan Yunus, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin)
Marulak Pardede, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Henry Donald Lbn. Toruan, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Dr. dr. Trini Handayani, S.H., M.H. (Universitas Suryakancana)
Aji Mulyana, S.H., M.H. (Universitas Suryakancana)
Nevey Farida Ariani, S.H., M.Hum.
Muhaimin, S.H.

Editor Pelaksana:

Fitriyani, S.H., M.Si.

Sekretaris:

Dra. Evy Djuniarti, M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Asisten Editor:

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
Lindung Budi Mulyawan, S.H.
Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P.
Mira Sukmawati, S.I.P
B. Lora Christyanti, S.I.P
Amirah Balqis, S.H.
Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M. (Badan Pembinaan Hukum Nasional)

Teknologi dan Sistem Informasi:
Haddryson, S.H., M.H.
Mochamad Arip, S.Kom.
Andi Rarung, S.H., M.H.
Agus Priyatna, S.Kom.
Fadillah Said, S.Kom.
Harysandy Permana, S.Kom.
Adi Octaviantara, A.Md.
Tegar Christopher Yolanda, S.I.P.
Imam Mahdi Nashif, S.Kom.

Mitra Bestari:

1. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)
2. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)
3. Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M. (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
4. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)
5. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)
6. Ayup Suran Ningsih, S.H., LL.M., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang)
7. I Gusti Ngurah Parikesit, S.H., M.Hum., LL.M. (Fakultas Hukum Universitas Udayana)
8. Muhammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn. (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)
9. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)
10. Amanda Adelina Harun, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo)

Alamat Redaksi:
Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5 Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 2525015, Fax: (021) 2526438

Email:
balitbangkumham@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii

ADVERTORIAL v

KUMPULAN ABSTRAK vii

Synchronization of Green Bond Regulations as Financing for Battery Electric Vehicle Conversion in Indonesia 215-228
Budi Endarto

Dekonstruksi Hukum *Social Commerce* Indonesia: Perspektif Demokrasi Ekonomi di Era Digitalisasi 229-246
Aditya Prastian Supriyadi

Penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) sebagai Bahan Pertimbangan Putusan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 247-264
Syamsul Fatoni, Erma Rusdiana

Promotion of Sustainable Social Bonds Base on Indonesia's Constitutional Perspective 265-278
Dwi Elok Indriastuty, Nur Hidayatul Fithri

Existence of Wali Mujbir Syafi'i Fiqh from the Perspective of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes 279-294
Zaein Wafa, Miftahudin Azmi

Keamanan Investasi *Online*: Evaluasi Regulasi Perlindungan Investor dalam Konteks Robot *Trading* di Indonesia 295-306
Muhammad Saeful Rizzal, Ahmad Rustan, Rudy Iskandar Ichlas

Comparative Analysis of Land Management Approaches for Public Development on Customary Land: Emphasizing Cooperative Land Banking (CLB) in the Minangkabau Case Study 307-320
Refina Mahargita, Ahmad Baikuni Perdana, Muhammad Yusuf Syaifullah

Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum 321-334
Subianta Mandala

PROFIL PENULIS xi

PETUNJUK BAGI PENULIS xv

TEMPLATE (MODEL) NASKAH xvii

ADVERTORIAL

Syukur ke hadirat Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, bekerja sama dengan Perhimpunan Peneliti Hukum Indonesia dapat terbit kembali Jilid 24 Nomor 3 November 2024.

Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jilid 24 Nomor 3 November 2024 memuat 8 (delapan) artikel dari berbagai lembaga penelitian di Indonesia maupun civitas akademika. Untuk meningkatkan perbaikan sistem hukum dan perundang- undangan, diperlukan upaya perbaikan yang signifikan terhadap kebijakan strategis pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, redaktur Jurnal Riset De Jure Jilid 24 Nomor 3 November 2024 mengangkat pasal-pasal antara lain *synchronization of green bond regulations as financing for battery electric vehicle conversion in Indonesia*; dekonstruksi hukum *social commerce* Indonesia: perspektif demokrasi ekonomi di era digitalisasi; penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) sebagai bahan pertimbangan putusan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; *promotion of sustainable social bonds base on Indonesia's constitutional perspective*; *existence of wali mujbir syafi'i fiqh from the perspective of law no. 12 of 2022 on sexual violence crimes*; keamanan investasi *online*: evaluasi regulasi perlindungan investor dalam konteks robot *trading* di Indonesia; *comparative analysis of land management approaches for public development on customary land: emphasizing cooperative land banking* (CLB) *in the Minangkabau case study*; pembangunan hukum nasional dalam perspektif teori dan filsafat hukum. Melalui tulisan-tulisan tersebut, mereka dapat menyumbangkan pemikiran yang menjadi bahan referensi dalam memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum di masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis yang telah memercayai Jurnal Penelitian Hukum De Jure untuk menerbitkan karyanya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu, meneliti dan mengoreksi tulisan-tulisan penulis dalam publikasi ini.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan Himpunan Peneliti Hukum Indonesia yang telah berkenan menerbitkan Jurnal Penelitian Hukum De Jure ini.

Editor:

Jakarta, November 2024

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Budi Endarto

Synchronization of Green Bond Regulations as Financing for Battery Electric Vehicle Conversion in Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 3, November 2024, Halaman 215-228

Transportation is still the largest emission-contributing sector in Indonesia. However, the Government has set an aggressive electrification target in the transportation sector if it needs to be balanced with a financing scheme for energy conversion towards battery electric vehicles (BEV). For this reason, BEV conversion industry players should utilize green bond financing schemes. The main issue lies in the need for more alignment between EV conversion industry regulations and financing models for the sector. However, the Government needs to harmonize rules and coordination among sectoral institutions such as the OJK, Ministry of Finance, Ministry of Industry, and Ministry of Transportation. Especially concerning Regulation Number 39 of 2023 regarding the Conversion of Fuel-Powered Motorcycles into Battery-Based Electric Motorcycles, and Minister of Transportation Regulation Number 15 of 2022 regarding Motor Vehicle Conversion to formulate green bonds as an alternative financing option for BEV programs. The method used in this writing is normative legal research of the exploratory type with a statutory and conceptual approach. The result shows that through the synchronization model of green bond financing regulations with the battery electric vehicle conversion regulation and coordination between sectoral institutions, it is expected to accelerate the commitment to realize net zero emission and as an effort to mitigate the energy crisis and reduce fuel energy subsidies in Indonesia.

Kata kunci: ***Green Bond; Conversion Finance; Battery Electric Vehicle***

Aditya Prastian Supriyadi

Dekonstruksi Hukum Social Commerce Indonesia: Perspektif Demokrasi Ekonomi di Era Digitalisasi

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 3, November 2024, Halaman 229-246

Social commerce (*S-Commerce*) berasal dari disrupsi digitalisasi bisnis yang menggabungkan *E-Commerce* dengan media sosial. Di saat S-Commerce sedang berkembang, Indonesia justru melarang platform tersebut karena dianggap telah mengkapitalisasi pasar yang dapat mematikan usaha lokal. Keputusan tersebut berpotensi kontradiktif dengan demokrasi ekonomi berdasarkan salah satu ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang membuka ruang teknologi untuk pengembangkan perekonomian nasional. Tujuan penulisan artikel ini untuk melakukan dekonstruksi hukum *S-Commerce* melalui kajian Demokrasi Ekonomi di era digitalisasi sebagai anulir kebijakan Pemerintah yang melarang *S-Commerce* di Indonesia. Penyusunan artikel tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menjawab isu problematika hukum yang telah teridentifikasi. Selain itu, agar hasil analisis lebih komprehensif, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, komparasi hukum, dan konseptual dalam kajian. Terdapat 2 (dua) hasil penelitian dalam artikel ini. Pertama, keputusan pelarangan *S-Commerce* oleh Pemerintah telah mendegradasi negara di era digitalisasi di saat negara-negara besar sedang masifnya mengadopsi teknologi untuk pengembangan perekonomian nasional mereka. Berdasarkan doktrin digitalisasi hukum ekonomi kurang tepat apabila harus melarang *S-Commerce*. Karena paradigma bisnis era kontemporer saat ini harus terintegrasi dengan teknologi agar dapat bersaing dengan perkembangan perekonomian digital di ranah global. Kedua, berdasarkan demokrasi ekonomi dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945, S-Commerce merupakan manifestasi dari perekonomian nasional yang berwawasan keseimbangan kemajuan. Melarang *S-Commerce* sama saja merampas hak askes ekonomi yang telah dijamin konstitusi. Namun, ketentuan *S-Commerce* perlu didekonstruksi melalui prinsip demokrasi ekonomi agar menjadi ada pedoman hukum yang berkeadilan sehingga dapat mendukung perkembangan ekonomi digital tanpa mematikan ekonomi lokal.

Kata kunci: Demokrasi Ekonomi; Social Commerce; Hukum

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Syamsul Fatoni, Erma Rusdiana

Penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) sebagai Bahan Pertimbangan Putusan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 3, November 2024, Halaman 247-264

Penelitian ini mengkaji penggunaan *Artificial Intelegent* (AI) sebagai bahan pertimbangan Hakim dengan memperhatikan evolusi atau perkembangan teknologi untuk mewujudkan putusan hukum yang berkeadilan dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, mengingat belum ada peraturan yang spesifikasi mengatur penggunaan AI dalam putusan pengadilan. Studi ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan normatif, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan menggunakan berbagai jenis bahan hukum serta analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah penggunaan AI sebagai bahan pertimbangan putusan Hakim berisikan pertimbangan, menginvetarisir informasi dan data sehingga mempermudah hakim dalam menjatuhkan putusan secara optimal, efektif dan efisien. Sedangkan sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana dengan penggunaan AI dalam putusan Hakim menuju hukum yang berkeadilan adalah Hakim sebagai sub-Sistem Peradilan Pidana, dimana putusan Hakim seharusnya memperhatikan berita acara pemeriksaan, dakwaan dan kondisi faktual yang dipengaruhi sosial, budaya, dan ekonomi. Kesimpulannya, penggunaan AI akan mempermudah dalam sistem sistem pembuktian oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam pengambilan putusan dan sinkronisasi sistem peradilan pidana harus sesuai kondisi faktual serta tujuan pemidanaan. Sarannya, penggunaan AI yang memuat aspek juridis berdasarkan algoritma dengan mengesampingkan aspek non-juridis (aspek humanitis, kondisi sosial, ekonomi dan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana) perlu dipertimbangkan agar terdapat sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana untuk mewujudkan legal justice, moral justice dan social justice. Dibutuhkan peran Mahkamah Agung dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim sehubungan pemanfaatan AI termasuk legalisasi hukumnya dengan tetap memperhatikan hukum, etika, nilai-nilai sosial dan prinsip hukum yang berkeadilan.

Kata kunci: *artificial intellegence*; sistem peradilan pidana; putusan hakim

Dwi Elok Indriastuty, Nur Hidayatul Fithri

Promotion of Sustainable Social Bonds Base on Indonesia's Constitutional Perspective

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 3, November 2024, Halaman 265-278

Social bonds are one of the types based on available themes regulated in POJK No 18 of 2023. The drafting of POJK 18/2023 did not consider regulations from a theoretical or constitutional perspective, which should be the primary consideration for any legislative regulation. This article results from research aimed at finding arguments and constitutional rationality. The research method used in this study is normative exploratory legal research with a constitutional approach and a conceptual approach. According to universal legal principles, laws and regulations subordinate to the Constitution must not contradict higher laws. This is where the concept of legal hierarchy and regulations becomes necessary so that regulations do not conflict with those above them, including the highest point, the Constitution. This article will closely examine several areas of social bond regulation from the perspective of the Indonesian Constitution. The research findings reveal juridical arguments and rationality that, as a welfare-oriented state in its constitution and born from its collectivist cultural background, social bond regulation aligns with the principles of the constitution applicable in Indonesia.

Kata Kunci: *constitutional, regulation, social bond*

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Zaein Wafa, Miftahudin Azmi

Existence of Wali Mujbir Syafi'i Fiqh from the Perspective of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 3, November 2024, Halaman 279-294

Forced marriage by guardians is recorded as a form of sexual violence in Indonesia. Government regulation Article 10 of Law No. 12 of 2022 explains that forced marriage is divided into 3, namely child marriage, in the name of culture, and rape victims. The background of this research is due to the problem of the great authority held by the guardian of the mujbir as the guardian of the marriage of children or grandchildren. This great authority is in the form of forced marriage carried out by the guardian of the mujbir without the consent of the bride. The concept of the guardian of the mujbir is a concept contained in the views of the Imam Syafi'i school of thought, as one of the schools of thought widely used in Indonesia. The practice of the guardian of the mujbir in Indonesia certainly raises problems when associated with the provisions of Article 10 of Law Number 12 of 2022, which states that forced marriage is a criminal act of sexual violence. So there are two legal problems. First, is it possible for the view of the Imam Syafi'i school of thought on wali mujbir to be applied in Indonesia second, how is the legitimacy of the authority to force marriage held by the wali mujbir reviewed from the objectives of Islamic law maqashid sharia By using the normative legal research method with a conceptual approach and literature study method, the results obtained are that the concept of wali mujbir is contrary to Law Number 12 of 2022 because it causes forced marriage which is a criminal act of sexual violence so that the view on the concept of wali mujbir cannot be implemented in Indonesia. Viewed from the perspective of its benefits, the concept of wali mujbir is not more beneficial. It causes more forced marriage practices and does not protect women and their rights.

Kata Kunci: ***Forced Marriage; Maqasid Syari'ah; Wali Mujbir***

Muhammad Saeful Rizzal, Ahmad Rustan, Rudy Iskandar Ichlas

Keamanan Investasi *Online*: Evaluasi Regulasi Perlindungan Investor dalam Konteks Robot Trading di Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 3, November 2024, Halaman 295-306

Investasi merupakan sebuah gaya hidup baru bagi sebagian orang, karena dalam promosi investasi itu sendiri biasanya beberapa perusahaan melakukannya dengan iming-iming return yang menguntungkan. Investasi di Indonesia sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi nyata dan investasi keuangan. Korban investasi online robot trading belum mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau sistem perizinan dan perlindungan korban investasi online robot trading di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan masyarakat sebagai investor. Kegunaan dalam penelitiin ini sebagai pengetahuan agara Masyarakat mengetahui investasi yang legal atau illegal sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pasar Modal, serta regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memahami sejauh mana regulasi yang ada mampu melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang disebabkan oleh investasi di robot trading. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban investasi online robot trading di Indonesia perlu diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pasar. Regulasi yang lebih ketat dan spesifik dalam mengatur operasional platform robot trading. Hendaknya Masyarakat harus lebih waspada terkait investasi online agar tidak menjadi korban.

Kata Kunci: Lisensi investasi; Regulasi; Perdagangan robot

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Refina Mahargita, Ahmad Baikuni Perdana, Muhammad Yusuf Syaifullah

Comparative Analysis of Land Management Approaches for Public Development on Customary Land: Emphasizing Cooperative Land Banking* (CLB) *in the Minangkabau Case Study

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 3, November 2024, Halaman 307-320

Customary land, known as tanah ulayat in Indonesia, holds a unique status that differentiates it from other land types, particularly when used for public purposes. Government land acquisition practices risk eroding this status, potentially affecting Indigenous social groups. Cooperation between the government and indigenous communities, through regional governments and other institutions, is recommended as an alternative approach to land acquisition. This research examines various land management tools, focusing on customary land in Minangkabau for public and development purposes. Using a juridical-normative method linked to legal products and content analysis of previous studies, the research identifies three key variables related to customary land: control, utilization, and legality. These variables are analyzed within the context of public interest and research limitations. Three land provision schemes are explored: Land Provision, Cooperative Land Banking (CLB), and Land Commercialization. Each scheme has distinct impacts on land ownership, legality, and the collective well-being of indigenous communities. While Land Provision offers immediate compensation but forfeits land control, CLB and Land Commercialization allow indigenous groups to retain land ownership, with CLB being the preferred option due to its promotion of sustainable land use and active community involvement. The study concludes that CLB is the most viable approach for ensuring long-term economic benefits and land control for Indigenous communities. However, it requires government support regarding legal adjustments and frameworks for cooperation.

Kata Kunci: ***Land Management Approaches, Customary Land, Cooperative Land Banking*** **(CLB)**

Subianta Mandala

Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 3, November 2024, Halaman 321-334

Tulisan ini membahas beberapa isu strategis mengenai pembangunan hukum nasional dalam perspektif teori dan filsafat hukum. Keinginan untuk menggantikan rezim hukum kolonial Belanda sudah digaungkan sejak lama, bahkan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Namun proses untuk menggantikan hukum kolonial dengan hukum nasional tersebut berjalan sangat lamban. Ada beberapa isu strategis yang dibahas dalam tulisan ini, di antaranya: bagaimanakah politik hukum terkait unifikasi dan pluralisme hukum di Indonesia? bagaimana kebijakan negara terhadap hukum tertulis dan tidak tertulis? termasuk di dalamnya kebijakan negara terhadap pengembangan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum bagi pembangunan hukum nasional ke depan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana teori dan filsafat hukum dapat digunakan sebagai landasan teoritis dan filosofis untuk menjawab beberapa isu strategis dalam konteks pembangunan hukum nasional, dan bagaimana politik hukum pembangunan hukum nasional, khususnya terhadap beberapa isu strategis yang telah dikemukakan di atas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sampai dengan saat ini belum ada dokumen (hukum) ataupun peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif memuat arah politik hukum pembangunan hukum nasional. Secara umum, pembahasan terkait isu pembangunan hukum nasional masih terbatas dikalangan ahli hukum dan akademisi hukum. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa sejauh ini paham atau aliran positivisme mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsep pembangunan hukum nasional yang berkembang saat ini. Namun demikian, secara perlahan terjadi perubahan paradigma dari cara berpikir yang sangat positifistis ke arah pendekatan yang lebih sosiologis, humanis dan etis.

Kata Kunci: Pembanguan Hukum; Teori Hukum; Politik Hukum